Riza Patria Janji Tutup Semua Lokasi Prostitusi di Jakarta

JAKARTA (IM) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berjanji menutup semua lokasi prostitusi karena praktik tersebut melanggar aturan hukum. "Kami tidak memperkenankan adanya prostitusi di Jakarta, di mana saja, apalagi terkait anak-anak harus kami jaga," kata Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria di Jakarta, Sabtu (24/9).

Pihaknya akan mengerahkan petugas Satpol PP termasuk instansi terkait lainnya untuk segera menutup lokasi prostitusi.

Ia pun meminta masyarakat untuk melaporkan adanya praktik prostitusi sehingga bisa segera ditindaklanjuti. "Silakan masyarakat, wartawan, media sampaikan kepada kami apabila mengetahui ada tempat prostitusi di Jakarta akan kami tutup semua, sampaikan saja, kami akan tutup semua," katanya.

Pihaknya akan memperketat pengawasan. Salah satunya dengan berencana menambah kamera pengawas (CCTV).

"DKI Jakarta bekerja sama dengan Polda Metro, Kodam Jaya juga memasang ribuan CCTV di seluruh Jakarta. Ini juga satu upaya kami, ke depan tiap tahun akan kami tambah," kata Riza.

Penegasan untuk menutup lokasi prostitusi di Jakarta mencuat setelah muncul kasus pemerkosaan yang menimpa gadis berusia 13 tahun di dekat Hutan Kota Rawa Malang di Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara, pada awak September 2022.

Komplek prostitusi berada sekitar satu kilometer (km) dari kawasan hutan kota tersebut. Ketua RW 010 Semper Timur, Ahmad Syarifudin mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera menutup komplek prostitusi itu yang diduga memberi pengaruh terhadap kasus pemerkosaan itu.

"Maksud saya itu, seharusnya benar-benar ditutup. Tanpa ada kecuali, apalagi dalam keadaan seperti ini (ada anak yang mendapat kekerasan seksual di Hutan Kota Rawa Malang)," kata Syarifudin saat dihubungi wartawan, Kamis (22/9). ● **yan**

Pemkab Bekasi Bentuk Satgas untuk Pilih Koperasi Sehat

CIKARANG (IM) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, membentuk satuan tugas (satgas) khusus yang bertugas memilah koperasi dengan kondisi sehat agar dapat dipertahankan sekaligus dikuatkan untuk terus tumbuh dan berkembang.

"Kita sudah membentuk satgas untuk menyisir itu, jadi kita cek aktivitas dan susunan pengurus," kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bekasi, Iyan Priyatna di Cikarang, Minggu (25/9).

Dia mengatakan pembentukan satgas khusus ini mengacu kebijakan pemerintah pusat yang menginstruksikan daerah untuk memprioritaskan kualitas daripada kuantitas koperasi.

"Sekarang ini kita fokus ke kualitas, jadi tidak mengejar kuantitas. Arah kebijakan pusat juga seperti itu. Jadi daripada koperasi banyak tapi tidak berkualitas," katanya.

Berdasarkan hasil pendataan, diketahui ratusan koperasi di Kabupaten Bekasi saat ini kondisinya mati suri dengan beragam penyebab seperti terdampak pandemi COVID-19 serta terjebak kredit macet.

Ia menyebutkan bahwa jumlah koperasi yang tercatat di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bekasi sebanyak 1.100 koperasi. Dari jumlah tersebut, hanya 525 koperasi saja yang masih aktif.

"Kemudian berdasarkan hasil pemilahan sementara satgas khusus kami, dari 525 koperasi yang masih aktif tersebut, hanya sekitar 200 koperasi yang dinyatakan sehat," ucapnya.

Iyan mengaku ratusan koperasi yang tidak aktif di Kabupaten Bekasi bisa juga disebabkan berbagai persoalan selain terdampak pandemi dan juga kredit macet. Seperti sudah tidak ada aktivitas bisnis dan belum memperbaharui badan hukum.

"Ada juga koperasi yang tidak aktif karena sudah lama tidak mengadakan RAT, tapi koperasi yang sudah tidak aktif itu masih tercatat di kita," ucap dia. ● **yan**

Kegiatan di DPKPP Kota Bekasi Dipertanyakan

FOTO : MADONG LUBIS/INTERNATIONAL MEDIA, SENIN (19/9).

Pelaksanaan Kegiatan Renovasi Gedung Sekretariat PK KNPI Kecamatan Rawalumbu.

KOTA BEKASI (IM) - Kegiatan Renovasi Gedung Sekretariat PK KNPI Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat dipertanyakan. Pasalnya, pemasangan selasar gedung itu diduga tidak mengikuti gambar yang ada.

Terkait hal itu, Kepala Bidang Perumahan dan Pemukiman pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, Iim, saat ditemui di kantornya, Jum'at (23/9) tidak ada di tempat.

"Bapa sedang pendidikan," ujar Dwi, salah staf di Bidang Perumahan dan Permukiman itu. Iim dan juga pejabat penanggungjawab teknis kegiatan (PPTK) atas kegiatan dimaksud, kata staf perempuan itu, juga sedang mengikuti pendidikan hingga beberapa bulan.

Dwi menambahkan, wartawan yang ingin mendapatkan informasi dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi diminta untuk membuatkan surat tertulis yang ditujukan kepada kepala dinas.

"Silahkan mengajukan surat ! Setelah itu akan dijawab. Surat itu ditujukan kepada kepala dinas. Oleh kepala dinas, surat itu nanti akan diteruskan ke bidang terkait," ucap Dwi.

Ia mengatakan, jika sistim (mengajukan surat guna konfirmasi-red) itu sudah berlaku sejak lama. "Ada, kok, pemberitahuannya di situ," ucapnya heran.

Ditanya terkait berapa lama jawaban akan diterima wartawan setelah mengajukan surat, Dwi tidak memberi jawaban secara jelas. "Itu tergantung kapan bapak mengajukan suratnya," ujarnya. ● **mdl**

FOTO/ANT

FESTIVAL PESONA WISATA PESISIR
Sejumlah Prajurit TNI AL saat atraksi perahu naga di Festival Pesona Wisata Pesisir di Waduk Pluit, Jakarta Utara, Minggu (25/9). Festival tahunan tersebut untuk mempromosikan wisata di daerah Jakarta Utara dengan kegiatan seperti perahu naga, lomba layang-layang dan bersih -bersih waduk Pluit.

Pemprov DKI Bakal Bangun Rusunawa di Pulau Reklamasi Pantai Kita

Pantai Kita merupakan salah satu pulau reklamasi yang saat ini tengah dibangun Pemprov DKI. Meski pembangunan Pulau C untuk kepentingan bisnis, namun juga harus diimbangi untuk kepentingan masyarakat, salah satunya pembangunan rusunawa, kata Riza.

JAKARTA (IM) - Pemprov DKI Jakarta akan membangun rusunawa di proyek reklamasi Pulau C atau Pantai Kita di Pantai Utara Jakarta. Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahamad Riza Patria, tak mungkin pulau tersebut semuanya hanya permukiman.

"Di situ kan harus saling mendukung antara kepentingan warga, kepentingan permukiman, kepentingan komersil juga untuk saling melengkapi dan saling mendukung serta kepentingan lainnya," ujar Riza di Perpustakaan Nasional, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Minggu (25/9).

Dia juga tak memungkiri dibangunnya Pulau C untuk kepentingan bisnis. Namun, juga harus diimbangi kepentingan masyarakat, salah satunya pembangunan rusunawa. Pembangunan rusunawa di Pulau Kita tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI 2023-2026.

Pantai Kita merupakan salah satu pulau reklamasi yang saat ini tengah dibangun Pemprov DKI. Sementara itu, berdasarkan Pasal 192 nomor 3 Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan DKI Jakarta, Pulau G diarahkan untuk permukiman.

Riza menuturkan Pulau G terbuka untuk warga Jakarta. Menurutnya, tidak boleh ada wilayah mana pun di Jakarta yang eksklusif. "Yang tidak boleh didatangi atau sepihak itu tidak boleh, semua harus diberi kesempatan siapa saja," tegasnya.

Setiap warga Jakarta harus diberikan kesempatan yang sama. "Salah satunya untuk permukiman. Nanti akan dibahas apalagi selain permukiman pasti ada permukiman ya bisa jadi dibahas bersama," ucapnya.

Belum Ada Bangunan Permanen

Ahmad Riza Patria juga menegaskan, belum ada bangunan permanen yang berdiri di zona ambang permukiman Reklamasi Pulau G.

"Belum ada bangunan permanen yang terlihat di pulau (G) sampai saat ini," kata Ariza kepada wartawan di Hotel Grand Cempaka, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Sabtu (24/9).

Pulau G bakal dijadikan zona ambang permukiman. Meski demikian, Ariza belum mengetahui kapan mulai ada pembangunan di kawasan tersebut.

"Belum, ini kan baru dalam pembahasan ya, nanti segera kita sampaikan. Nanti kita tunggu saja. Prinsipnya semua wilayah DKI Jakarta akan kita fungsikan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk kepentingan masyarakat Jakarta dan masyarakat Indonesia lainnya," ucap Ariza. Sebelumnya, Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) DKI Jakarta, Heru Hermawanto menyebut masih banyak warga Jakarta yang memerlukan hunian. Atas dasar itu Pemprov DKI menetapkan Pulau Reklamasi, Pulau G sebagai zona ambang yang diarahkan untuk kawasan permukiman. "Diutamakan kalau boleh permukiman kami mintanya," kata Heru kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (21/9). ● **yan**

Pj Bupati Dani Ramdan Harap BPR Wibawa Mukti Tingkatkan Perekonomian Kabupaten Bekasi

BALI (IM) - Guna mengoptimalkan peran dan fungsi dalam menggerakan perekonomian daerah, dilakukan perubahan bentuk hukum perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Hasil Merger menjadi Perseroan Terbatas.

Pj. Bupati Bekasi, Jawa Barat, Dani Ramdan menyebut, terkait dengan upaya yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan merger kepada 4 daerah di Jawa Barat, pihaknya memberikan dukungan penuh karena hal ini dapat memberikan dampak positif seperti memperbesar permodalan, mempermudah pengawasan, baik dari sisi pemilik/pemerintah daerah maupun meningkatkan penyaluran kredit dan memperkuat dukungan dalam pembangunan daerah.

Hal ini dikatakannya, pada saat menghadiri kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bersama Divisi MAP BJB, Kepala Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan Provinsi Jabar, Direksi dan Komisaris PT BPR Wibawa Mukti Jawa Barat. Rapat ini berlangsung di Hotel Tribe, Kuta, Bali, Kamis (22/9).

"Kinerja PT BPR Wibawa Mukti Jabar ini dinilai membaik setidaknya dalam dua tahun terakhir, upaya yang dilakukan Pemrov untuk merger PT di Jawa Barat, salah satunya ada PT BPR Wibawa Mukti pada prinsipnya secara administrasi sudah dibicarakan dan diterbitkan. Saya mendukung kegiatan ini dengan tujuan mempererat permodalan sehingga kita bisa mengembangkan usaha, khususnya dalam aspek digitalisasi," ujar Pj. Bupati dalam rilis Prokopim Setdakab Bekasi, Sabtu (24/9).

Disebutkan, bahwa semula PD BPR LK Kabupaten Bekasi yang dimerger kedalam PD BPR LPK Bekasi terdiri dari atas PD BPR LPK Setu, Sukatani, Pondokgede, Cibarusah dan Cibitung, yang kemudian menjadi perseroran terbatas PT BPR Wibawa Mukti Jabar berdomisili di Daerah Kabupaten Bekasi.

Pj. Bupati Bekasi (kanan atas) saat menghadiri kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bersama Divisi MAP BJB, Karo BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan Provinsi Jabar, Direksi dan Komisaris PT BPR Wibawa Mukti Jawa Barat di Hotel Tribe, Kuta, Bali, Kamis (22/9).

Menurutnya, PT BPR Wibawa Mukti Jabar dapat mengembangkan bisnisnya dalam unit layanan IT digital. Karena saat ini, bisnis keuangan harus mampu menggunakan teknologi digital sehingga dapat meningkatkan kontribusinya untuk masyarakat Kabupaten Bekasi.

"Setelah ini maka BPR bisa mengembangkan bisnisnya dan meningkatkan unit layanan IT digital. Tentu saat ini bisnis keuangan harus menggunakan teknologi digital sehingga kontribusi yang diraih dapat maksimal khususnya untuk masyarakat," katanya.

Dirinya berharap, dengan kekuatan modal yang besar akan lebih berkembang dalam segi pelayanan produk, pelayanan nasabah, dan meningkatkan kapasitas manajemen. Serta deviden yang didapatkan untuk melayani masyarakat terjamin.

"Kita berharap dengan kekuatan modal yang besar akan lebih banyak pelayanan produk-produk yang bisa dikembangkan, jumlah nasabah yang bisa dilayani, tentu sisi kapasitas manajemen bisa meningkat. Semoga nanti deviden terhadap Kabupaten Bekasi juga layanan kepada masyarakatnya terjamin. Di sini selain Pemkab Bekasi, Provinsi dan Bank BJB ikut sebagai pemegang saham yang akan mendampingi dan mengayomi untuk kemajuan BPR Wibawa Mukti." ungkapnya. ● **mdl**

SELAIN BANGUN JALUR SEPEDA

DPRD: Perbaikan Angkutan Umum Diprioritaskan

JAKARTA (IM) - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, M. Taufik Zulkifli menyambut positif target Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang ingin menyediakan 535 km jalur sepeda pada 2026 yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah sebagai penjelasan dari Peraturan Gubernur No 31 tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi DKI Jakarta.

Namun, ia memberikan catatan bahwa dalam menyediakan jalur sepeda yang masif, Pemprov DKI tetap harus terlebih dulu memprioritaskan perbaikan angkutan umum yang menyeluruh. "Untuk menjadikan Jakarta makin baik dan modern, kita harus sebanyak-banyaknya mendorong agar masyarakat beralih ke transportasi publik. Juga mengajak warga Jakarta bersahabat dengan lingkungan," kata Taufik saat dihubungi, Minggu (25/9).

Taufik melanjutkan, Wali Kota Bogota dulu, yang membangun sistem 'busway' serta menjadi rujukan kota-kota dunia mengatakan bahwa negara berkembang bukan tempat di mana orang miskinnya membeli mobil tapi negara atau kota di mana orang-orang kayanya mau menggunakan transportasi publik.

Pembangunan sistem transportasi di Jakarta yang fokus pada pembenahan transportasi publik makin memperlihatkan hasil dengan bertambahnya warga yang naik TransJakarta, MRT, LRT, dan JakLingko. Berbarengan dengan itu dibangun juga trotoar pejalan kaki yang luas dan jalur sepeda yang makin panjang. Berjalan kaki dan bersepeda sehat untuk warga dan tidak menimbulkan polusi udara.

"Jadi peningkatan jalur sepeda adalah bagian dari pembangunan sistem transportasi Jakarta yang bervisi menjadi kota yang makin modern. Supaya pembangunan jalur sepeda itu sukses, harus disosialisasikan kepada masyarakat gambaran besar dari visi sistem transportasi Jakarta ke depan. Bisa dilakukan edukasi secara masif ke generasi muda misalnya di sekolah-sekolah dan kampus," lanjutnya.

"Selain itu pembenahan transportasi publik dan pelayanannya juga harus terus ditingkatkan. Dengan demikian orang tidak perlu lagi menggunakan kendaraan pribadi terlalu sering," kata anggota Fraksi PKS itu.

Protes dari para pengendara bermotor terhadap masifnya jalur sepeda juga dapat muncul sebagai tantangan pengembangan jalur sepeda. Namun, yang harus dilihat adalah bahwa yang protes terhadap jalur sepeda dilakukan oleh pengguna kendaraan bermotor pribadi. "Jika pengguna kendaraan pribadi makin sedikit maka jalan-jalan akan makin lengang dan protes berkurang," pungkasnya. ● **yan**

PENGUMUMAN HASIL AKHIR LIKUIDASI PT SENYUM BERSAMA INDONESIA

Untuk memenuhi ketentuan pasal 152 ayat 3 UU No.40 Tahun 2007 tentang perseroaan terbatas, dengan ini diumumkan bahwa PT SENYUM BERSAMA INDONESIA (dalam likuidasi) - "**Perseroan**", Berkedudukan di Jakarta Selatan telah selesai melaksanakan tahapan pembubaran dan likuidasi, termasuk menerima, menyetujui dan mengesahkan neraca likuidasi akhir perseroan, pemberesan dan pembayaran kewajiban dan utang kepada para kreditor dan pihak ketiga, pengajuan permohonan pencabutan perizinan perseroan serta pelepasan dan pembebasan tangung jawab secara penuh kepada likuidator perseroan.

Jakarta, 26 September 2022
PT SENYUM BERSAMA INDONESIA
(dalam likuidasi)
Ttd. Likuidator

PENGUMUMAN PENGAMBILALIHAN PT TCI BIOTEK INDONESIA

Direksi **PT TCI Biotek Indonesia ("Perseroan")**, mengumumkan sehubungan dengan rencana jual beli saham yang dilakukan oleh para pemegang saham, maka akan dilakukan perubahan pemegang saham dan pengendalian Perseroan. Adapun pengambilalihan tersebut akan dilakukan secara efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan.

Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa akan dilakukan dalam waktu 30 hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini dan apabila ada tanggapan/keberatan atas pengambilalihan saham tersebut dapat disampaikan secara tertulis selambat-lambatnya 14 hari setelah pengumuman ini disertai alasan-alasan dan bukti-bukti yang mendukung kepada Perseroan dengan alamat:

PT TCI Biotek Indonesia
Grand Slipi Tower Lt. 9 Unit. G, Jl. Letjend S.Parman Kav 22-24, Kel. Palmerah, Kec. Pal Merah, Kota Adm. Jakarta Barat, Prop. DKI Jakarta

Demikian pengumuman ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat 2 dan 8 UU No. 40 Tahun 2017 Tentang Perseroan Terbatas.